



PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Komang Subagiastra^a, I Putu Edy Arizona^{b,*}, I Nyoman Kusuma
Adnyana Mahaputra^c

^{a,b,c}*Universitas Mahasarakswati Denpasar, Jl. Kamboja No.11A, Denpasar-
Bali, Indonesia*

^{*}*(edyarizona@gmail.com)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel dari 30 perusahaan selama periode pengamatan 4 tahun berturut-turut sehingga menghasilkan total 120 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai proxy dari *good corporate governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: profitabilitas, kepemilikan Keluarga, tata kelola perusahaan, penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of profitability, family ownership and good corporate governance on tax evasion by focusing on manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2014. The sampling method used was purposive sampling with a sample of 30 companies during the observation period of 4 years in a row so as to produce a total of 120 samples. The analytical tool used in this study is the linear regression analysis. The test results showed that the return on assets as a proxy of a positive effect on the profitability of tax avoidance. Institutional ownership and the proportion of independent board as a proxy of good corporate governance also showed a positive effect on tax evasion.

Keywords: *profitability, family ownership, corporate governance, tax evasion*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak

(Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas yang merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi

nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).

Pajak penghasilan badan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chen *et al.* (2010) perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan

rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus.

Selain profitabilitas dan kepemilikan keluarga yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur *corporate governance* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hubungan antara pajak dengan *corporate governance* telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Desai dan Dharmapala, 2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Timbulnya kasus-kasus mengenai usaha untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui upaya tindakan penghindaran pajak menimbulkan pertanyaan bagi pihak *corporate governance* yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) belum diterapkan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Hal itu dapat memicu perusahaan untuk memberikan informasi yang kurang

sesuai dengan kenyataannya serta mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi untuk menghindari besarnya beban pajak terutang.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti *Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook*. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Lukviarman (2006), *Agency Theory* merupakan perspektif

yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan tujuan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan. Konflik yang disebabkan karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik keagenan (Ahmad dan Septriani, 2008).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan

sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan satu orang (agen) untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar ia menggambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Tax Avoidance

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara sehingga kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan. Ditambah lagi sistem yang dianut perpajakan di Indonesia adalah sistem *self assesment*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang.

Kepatuhan wajib pajak sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia. Jayanto (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan hingga melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak merupakan

keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakannya. Sikap wajib pajak terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak yang akan berujung pada tindakan penghindaran pajak (Frey, 2007).

Hanlon dan Heitzman (2010), pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi yang bervariasi. Salah satu pengukuran untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* dalam Hanlon dan Heitzman (2010) adalah *cash effective tax rates*. Pengukuran tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2010), yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva

perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010). Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Kepemilikan Keluarga

Salah satu definisi kepemilikan keluarga terdapat dalam penelitian Anderson dan Reeb (2003) yang menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang

dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya, Arifin (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama.

Corporate Governance

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam

menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) ini merupakan salah satu badan yang memberikan perhatian khusus terkait pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. Supatmi (2007) mengatakan bahwa sejauh ini IICG telah melakukan penelitian terkait penerapan *corporate governance* perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan menyusun pemeringkatannya yang disebut sebagai *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Suatu perusahaan dapat dikatakan sudah melakukan *Good Corporate Governance* apabila telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* Indonesia, terdapat lima komponen utama GCG yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kepemilikan Institutional

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam *agency theory* terdapat interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut.

Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Permanasari, 2010).

Menurut Sartika (2012) dan Permanasari (2010), kepemilikan institusional memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga

dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012).

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013). Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Komite Audit

Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).

Keberadaan komite audit untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan

dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Pembentukan komite audit bertujuan untuk (Asfiyati, 2012):

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak menyesatkan dan telah sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang bersifat material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Kualitas Audit

Salah satu unsur penting dalam penerapan *corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan atau transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan semakin dituntut oleh otoritas publik, yang dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Sartori, 2010). Guedhami *et al.* (2009) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang menyebar memiliki pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang diwujudkan

dalam pemilihan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pengukuran kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP yang dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012).

Auditor yang termasuk dalam kelompok *The Big Four* adalah sebagai berikut (Sulistiarini dan Sudarno, 2012):

1. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte)
2. *Ernest & Young* (EY)
3. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG)
4. *PricewaterhouseCoopers* (PwC)

Pengaruh Return on Asset Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas adalah faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan satu

indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2014) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, hasil penelitian Hanum, (2013) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H1: Bahwa *Return on Asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan (Anderson dan Reeb, 2003), jika kepemilikan keluarga mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan menurun. Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi dari pada perusahaan *non-keluarga*, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owners*) atau pihak manajer dalam perusahaan *non-keluarga*.

Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak (penghindaran pajak) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan *non-keluarga*. Sedangkan hasil penelitian Prakosa (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan *non-keluarga*. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh

fiskus pajak. Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan salah satu dari tindakan pajak agresif. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: Bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen. Karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai andil dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance*.

Pohan (2008), Maharani & Suardana (2014) dan Dewi (2014) menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yaitu mengurangi kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Annisa (2012) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen bersama dewan komisaris lainnya melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan, namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Dengan adanya komisaris independen maka setiap perumusan strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang

efektif dan efisien termasuk pada kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance* (Hanum, 2013).

Annisa (2012) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Annisa (2012) ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maharani & Suardana (2014) dan Prakosa (2014) yang menunjukkan hasil bahwa proksi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H4: Bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Hanum, 2013). Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif.

Prakosa (2014) dan Swingly (2015) menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan komite audit tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Prakosa (2014) dan Swingly (2015) ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2012), Maharani & Suardana (2014), dan Dewi (2014) menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan

terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kelima dari penelitian ini adalah:

H5: Bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Berdasarkan beberapa referensi, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012). Dengan demikian tanda-tanda tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui.

Annisa (2012), Dewi (2014) dan Maharani & Suardana (2014) menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti kualitas audit yang tinggi

dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dari penelitian ini adalah:

H6: Bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

METODE

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria (Ikhsan, 2008:64). Dalam penelitian ini definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tax Avoidance (Y)

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui *CASH ETR* (*cash effective tax rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Budiman (2012) dan Dewi (2014). Adapun rumus untuk menghitung *CASH ETR* adalah sebagai berikut:

$$CASH ETR = \frac{Pembayaran Pajak}{Laba sebelum Pajak}$$

Semakin besar *CASH ETR* mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Return On Asset (X₁)

Return on Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih & Sari, 2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kepemilikan Keluarga (X₂)

Penelitian ini menggunakan definisi kepemilikan keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003), yaitu semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga merupakan variabel dummy, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya.

Kepemilikan Institusional (X₃)

Menurut Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur

menggunakan prosentase kepemilikan institusional.

Proporsi Dewan Komisaris Independen (X₄)

Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal tersebut komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

$$\frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit (X₅)

Komite Audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang-kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan, 2008). Dalam

penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

Kualitas Audit (X_6)

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP Besar yang sering disebut (*The Big Four*) dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP Kecil (*non The Big Four*). Semakin besar sebuah KAP, semakin besar sumberdaya yang dimilikinya, sumber daya yang lebih besar diekspetasi memiliki hubungan dengan kualitas audit yang baik, dengan memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja.

Diaudit oleh *The Big Four* = 1

Diaudit oleh *non The Big Four* = 0

Metode Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Namun perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari

sampel. Tujuan menggunakan *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang memuat dan mempublikasikan laporan keuangan periode tahun 2011-2014.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami rugi periode tahun 2011-2014.
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki data mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.
4. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang asing.

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh sebanyak 30 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini dengan 120 observasi selama 4 tahun pengamatan.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Caranya adalah dengan membandingkan hasil dari

Kolmogorov-Smirnov hitung dengan Kolmogorov-Smirnov tabel. Kesimpulan dengan menggunakan hasil olahan SPSS dapat ditarik dengan melihat Sig (2-tailed). Jika Sig (2-tailed) lebih besar dari *level of significant* yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang dianalisis berdistribusi normal.

2. Uji multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan cara meregresi nilai *absolute residual* dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute residual* atau nilai signifikansinya di atas α , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul dari observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (Ghozali, 2006:95). Penentuan ada tidaknya kasus autokorelasi didasari oleh kaidah berikut.

$0 < d < d_l$ = Ada autokorelasi positif

$d_l \leq d \leq d_u$ = Tidak ada autokorelasi positif

$4 - d_l < d < 4$ = Ada autokorelasi negatif

$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = Tidak ada autokorelasi negatif

$d_u < d < 4 - d_u$ = Tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan dalam menguji hipotesis untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh *Return on Asset*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y= variabel *tax avoidance*

α = konstanta

X₁= Return On Asset
 X₂= kepemilikan keluarga
 X₃= kepemilikan institusional
 X₄=proporsi dewan komisaris independen
 X₅= komite audit
 X₆= kualitas audit
 β= koefisien regresi parsial
 e = error

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang terdiri dari uji koefisien determinasi

(R²), uji statistik F, dan uji statistik t (Ghozali, 2006:87).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,245 dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,090 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1. Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters	a,b	Mean	-0,1592509
		Std. Deviation	2,75859242
		Absolute	0,114
		Positive	0,052
		Negative	-0,114
Kolmogorov-Smirnov Z			1,245
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,090

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 2, nilai tolerance variabel bebas tidak kurang dari 10% dan nilai VIF semuanya kurang dari 10 yang berarti tidak ada

multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Koefisien

parameter variabel bebas tidak signifikan secara statistis. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Nilai signifikansi

masing-masing variabel dalam persamaan regresi di atas 0,05, hal ini berarti data bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. error				Tolerance	VIF
	(Constant)	0,338	0,101		3,354	0,001	
X1	-0,206	0,084	-,0222	-2,449	0,016	0,912	1,097
X2	-0,016	0,039	-0,040	-0,407	0,685	0,788	1,270
X3	-0,115	0,048	-0,238	-2,409	0,018	0,767	1,303
X4	0,188	0,081	0,219	2,310	0,023	0,836	1,196
X5	-0,007	0,018	-0,042	-0,368	0,713	0,578	1,713
X6	-0,006	0,022	-0,030	-0,266	0,719	0,608	1,644

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedekasitas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
	B	Std. error			
	(Constant)	2,666	1,365		1,952
X1	0,621	1,386	0,043	0,448	0,655
X2	0,269	0,414	0,062	0,649	0,518
X3	-1,059	0,753	-0,141	-1,407	0,162
X4	-0,362	1,334	-0,027	-0,271	0,787
X5	0,005	0,286	0,002	0,018	0,985
X6	0,681	0,355	0,221	1,919	0,058

a. Dependent variabel: Abs_Res

4. Uji Autokorelasi

ilai Durbin Watson sebesar 1,875. Nilai ini akan dibandingkan

dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 ($n = 120$) dan jumlah variabel bebas adalah 6 ($k = 6$). Oleh karena nilai Durbin Watson sebesar

1,875 berada diantara du yaitu 1,80 dan 4-du yaitu 2,20. Sesuai dengan tabel keputusan $du < d < 4-du$ ($1,80 < 1,875 < 2,20$) maka dapat disimpulkan bahwa model bebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,388 ^a	0,150	0,105	0,09391	1,875

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X3, X5
b. Dependent Variable: Y

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. error				Tolerance	VIF
(Constant)	0,338	0,101		3,354	0,001		
X1	-0,206	0,084	-,0222	-2,449	0,016	0,912	1,097
X2	-0,016	0,039	-0,040	-0,407	0,685	0,788	1,270
X3	-0,115	0,048	-0,238	-2,409	0,018	0,767	1,303
X4	0,188	0,081	0,219	2,310	0,023	0,836	1,196
X5	-0,007	0,018	-0,042	-0,368	0,713	0,578	1,713
X6	-0,006	0,022	-0,030	-0,266	0,719	0,608	1,644

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,388 ^a	0,150	0,105	0,09391	1,875

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 5.7. Dari tabel tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,338 - 0,206X_1 - 0,016X_2 - 0,115X_3 + 0,188X_4 - 0,007X_5 - 0,006X_6$$

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Diperoleh angka koefisien determinasi sebesar 0,105. Hal ini berarti bahwa 10,5% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen. Sedangkan sisanya 89,5% dijelaskan oleh faktor lain.

2. Uji Statistik F

Model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat

berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji t

Berdasarkan uji statistik t, menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu *Return On Asset*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Return On Asset* signifikansi untuk *Return On Asset* sebesar 0,016 ($\alpha < 0,05$), kepemilikan institusional sebesar 0,018 ($\alpha < 0,05$), dan proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,023 ($\alpha < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *Return On Asset*, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel *tax avoidance*.

Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,176	6	0,029	3,331	0,005 ^a
Residual	0,996	113	0,009		
Total	1,173	119			

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X4, X1, X3, X5

b. Dependent Variable: Y

Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. error				Tolerance	VIF
(Constant)	0,338	0,101		3,354	0,001		
X1	-0,206	0,084	-,0222	-2,449	0,016	0,912	1,097
X2	-0,016	0,039	-0,040	-0,407	0,685	0,788	1,270
X3	-0,115	0,048	-0,238	-2,409	0,018	0,767	1,303
X4	0,188	0,081	0,219	2,310	0,023	0,836	1,196
X5	-0,007	0,018	-0,042	-0,368	0,713	0,578	1,713
X6	-0,006	0,022	-0,030	-0,266	0,719	0,608	1,644

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik *Return On Asset* yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.
2. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini bisa disebabkan karena di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak yang menghitung, melaporkan dan membayar pajak mereka sehingga dapat dengan mudah mereka melakukan tindakan *tax avoidance*.
3. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan institusional yang merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang

- terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini berarti kepemilikan institusional memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham.
4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik proporsi dewan komisaris independen yang merupakan proksi dari *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.
 5. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik komite audit yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain yang berada didalam perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral.
 6. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kualitas audit yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil ini berarti perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memang lebih cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan

kesejahteraan mereka seperti kasus enron tahun 2004.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak disini hanya didasarkan dari *corporate governance* dan laporan keuangan yang ada didalam perusahaan yang kurang menggambarkan keadaan *riilnya*, karena data tentang penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian ini hanya 4 tahun, sehingga kurang mampu menggeneralisasi hasil penelitiannya.

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti peraturan perpajakan.
2. Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan agar seluruh elemen yang ada didalam perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* melampaui batas hukum diberikan sanksi yang sesuai. Selain itu agar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi

persyaratan yang ditetapkan untuk memiliki struktur *corporate governance* yang baik sehingga dapat dengan cepat mendeteksi segala kecurangan yang akan dilakukan perusahaan.

REFERENSI

Ada 4.000 PMA Mengaku Nilai Pajaknya Nihil http://akuntanonline.com/show_detail.php?mod=art&id=505&t=Ada%204.000%20PMA%20Mengaku%20Nilai%20Pajaknya%20Nihil&kat=Perpajakan. Diunduh tanggal 15, bulan Januari, tahun 2015.

Ahmad, A.W., dan Y. Septriani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Desember 2008, hal 47-55

Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.

Anderson, R. dan Reeb, D. 2003. Founding Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. *Journal of Finance* 58, 1301-1328.

Arifin, Z. 2003. Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi*. Depok, Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Brown, R. E and Mazur, M. J. 2003. IRS'S Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*, Vol. 56, No. 3, September 2003, pp 689-700.
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal* Universitas Islam Sultan Agung.
- Cahyani, Nur. 2010. Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2010, hal 10-23.
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *Rand Journal of Economics*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Desai, Mihir A. and Dharmika Dharmapala. 2008. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*.
- Dewi, Kristiana. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance Pada industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2, 2014, hal 249-260.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Frey, B. S and Torgler, B. 2007. Tax Morale and Conditional Cooperation. *Journal of Comparative Economics*, Vol. 35, No. 1, pp 136-159.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: BPFE Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guedhami, O., Pittman, J.A. and Saffar, W. 2009. Auditor choice in privated firms: Empirical evidence on the role of state and foreign owners. *Journal of Accounting & Economics*, Vol. 48, pp. 151-171.
- Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol 50, pp 127-178.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayanti, Alfiani Nur. 2013. Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi* Fakultas

- Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hutagoal, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Jayanto, Prabowo Yudo. 2011. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, pp 48-61.
- Jensen, M., dan W.H. Meckling. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3. Hal. 305-360.
- Kirchler E, Maciejovsky B, Schneider F. 2002. Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter?. *Journal of Economics Psychology* (2003), Vol. 24, pp 535-553.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol.18, hal 58 - 66.
- Lestari, Maharani Ika., Sugiharto, Toto. 2007. Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*.21-22 Agustus, Vol.2. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Lukviarman, Niki, 2006. "Board Governance dan Kinerja Perusahaan (Co-author dengan Intan Novia Fatma Nanda)". Makalah yang akan dipresentasikan pada "The 2nd Annual Corporate Governance Conference, Universitas Trisakti, Jakarta (2006) dalam Kumpulan Karya Tulis Niki Lukviarman, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Masri, I., dan D. Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin.
- Maharani, Cahya. dan Suardana, Alit. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2, 2014, hal 525-539.
- Makhfatih, Akhmad. 2005. Penggelapan Pajak di Indonesia: Studi Pajak Hotel non Bintang. *Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada*, 2005.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei 1999, hal 43-53.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan: Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Michelon, Giovanna dan Antonio Parbonetti. 2010. The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure. *Springer Science & Business Media* 14 September 2010.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan

- Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 2, Juli 2009, hal 113 – 135.
- Prakosa, Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok. 2014.
- Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2010, hal 61-78.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Tindakan Pajak Agresif. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Padang, hal.1 - 34.
- Sartika, Widya. 2012. Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Sartori, Nicola. 2010. Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com. Diunduh tanggal 23, bulan Maret, tahun 2015.
- Siahaan, Hinsa. 2004. Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimalkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*. Volume 7 No. 1.
- Sriwedari, Tuti. 2009. Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. <http://eprints.unsut.ac.id>
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sulistiari, Endina dan Sudarno. 2012. Analisis Faktor-Faktor Pergantian Kantor Akuntan Publik. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2012, hal 1-12.
- Swingly, Calvin. dan Sukartha, Made. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.1, 2015, hal 47-62.
- Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.
- Waluyo (2006), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indonesia Stock Exchange. 2014. Laporan Keuangan dan Tahunan. <http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaantercatat/laporan-keuangandantahunan.aspx>. Diunduh tanggal 24, bulan Mei, tahun 2015.

Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and

Taxpayer Compliance. *Revenue Law*.